BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut terdapat 3 unsur penting dalam pembangunan, unsur yang pertama adalah unsur suatu proses, dimana terjadinya suatu perubahan secara terus-menerus, yang kedua adalah unsur peningkatan pendapatan per kapita, dan yang ketiga ialah unsur kenaikan pendapatan per kapita penduduk tersebut yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang (Hudiyanto, 2014). Pada hakekatnya pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan atau usaha ke arah yang lebih baik secara terencana yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengupayakan munculnya pemerataan pendapatan masyarakat. Pembangunan secara tradisional dapat diartikan sebagai peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus-menerus pada suatu negara. Sedangkan pembangunan di daerah difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi, dan kabupaten/kota.

Perekonomian suatu negara dapat dikatakan baik apabila keadaan ekonominya stabil, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator makroekonomi. Indikator tersebut diantaranya nilai tukar mata uang, pendapatan nasional, neraca perdagangan, pengangguran, dan inflasi. Dari beberapa indikator tersebut, inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian suatu negara di seluruh dunia

karena kestabilan inflasi menjadi fundamental di dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Definisi dari inflasi itu sendiri adalah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus-menerus yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang pada periode tertentu. Inflasi sebagai indikator makro ini digunakan untuk melihat stabilitas perekonomian suatu negara dan pengaruh inflasi cukup besar terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi khususnya dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan domestik, perdagangan international, kesempatan kerja, dan lain-lain. Inflasi tidak menjadi masalah ketika inflasi masih pada kondisi rendah, stabil dan dapat dikendalikan. Inflasi dapat menjadi masalah apabila inflasi telah mencapai level yang tinggi, tidak stabil, dan sulit untuk dikendalikan. Ketika telah mencapai level yang sangat tinggi dan cukup parah inflasi dapat menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan dan mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus terus di waspadai agar tidak muncul bibit penyakit makroekonomi di Indonesia, pemerintah diharapkan dapat menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil.

Di salah satu negara di Benua Afrika yaitu Zimbabwe, inflasi menjadi momok yang sangat menakutkan, bahkan disama telah terjadi *hyperinflation* yang berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi, GDP Zimbabwe merosot hingga 18%. Hal ini tentu berdampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat (Ginting, 2016). Sedangkan di Indonesia, krisis moneter yang dulu terjadi pada tahun 1998 menyebabkan perekonomian Indonesia tidak stabil, kondisi ini disebabkan karena kenaikan inflasi yang sangat tinggi mencapai 77,63%. Menurut Atmaja dalam Langi dkk., (2014), inflasi di Indonesia dipicu oleh

kenaikan harga komoditi impor dan membengkaknya utang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika. Syarat utama negara dalam melakukan pembangunan dalam jangka panjang adalah terciptanya kestabilan ekonomi jangka pendek, agar inflasi tidak menjadi virus penyakit yang nantinya akan menjadi masalah yang kompleks dan sulit terkendali.

Menurut perspektif islam, gejolak ekonomi yang sering terjadi di beberapa negara disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi dan sulit dikendalikan akibat dari penggunaan mata uang yang tidak susuai menurut Al Qur'an. Penyimpangan ini terjadi karena fungsi mata uang tidak digunakan sebagaimana mestinya melainkan dijadikan sebagai alat komoditi untuk mendapatkan keuntungan.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *"...Yang demikian itu (orang yang kelak akan dibangkitkan dari kubur seperti orang gila), mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (QS.Al-Baqarah:275)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam pandangan islam uang harus di perlakukan menurut fungsinya yaitu sebagai alat hitung dalam menentukan harga, sebagai alat tukar, dan alat menyimpan kekayaan. Bukan dijadikan sebagai alat komoditi sebagaimana barang untuk memperoleh keuntungan malalui riba, karena dampaknya akan menyebabkan gejolak ataupun goncangan ekonomi.

"Janganlah kalian menjual belikan emas dengan emas kecuali dengan sama (timbangan dan ukurannya). Tidak boleh sebagiannya melebihi sebagian yang lain, kalian juga jangan menjual perak dengan perak kecuali dengan timbangan dan ukuran yang sama. Dan jangan menjual emas dan perak yang tidak ada di tempat saat melakukan transaksi (ghaib)." (HR. Bukhari)

Riba *fadhl* saat ini banyak diambil dalam praktik jual beli mata uang pada bursa valuta asing *(foreign exchange)*. Dengan adanya ketentuan suku bunga, maka pinjaman pada perbankan akan memerlukan pengembalian. Oleh karena itu, peminjaman perbankan biasanya hanya akan diberikan kepada peminjam yang mempunyai jaminan kredit untuk menutupi pinjaman tersebut dan memiliki kecukupan *cash flow* untuk memebuhi kewajibannya tersebut. akibatnya, dana bank akan mengalir hanya kepada golongan kaya saja. Golongan kaya yang memperoleh kredit tersebut umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak hanya untuk investasi produktif saja, melaikan untuk keperluan yang tidak produktif, seperti konsumsi barang mewah, spekulasi, dan sebagainya. Hal ini lah yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi akibat dari para spekulan mata uang di bursa valuta asing.

TABEL 1.1.
Inflasi 34 Provinsi di Indonesia (%)

No	Provinsi di Indonesia	2014	2015	2016	2017	2018
1	Nanggroe Aceh Darussalam	7.83	1.27	3.13	4.86	1.93
2	Sumatera Utara	8.24	3.32	6.6	3.18	1
3	Sumatera Barat	11.9	0.85	5.02	2.11	2.55
4	Riau	8.53	2.71	4.16	4.07	2.54
5	Jambi	8.72	1.37	4.54	2.68	3.02
6	Sumatera Selatan	8.38	3.05	3.68	2.85	2.78
7	Bengkulu	10.85	3.25	5	3.56	2.35
8	Lampung	8.36	4.65	2.75	3.14	2.92
9	Kepulauan Bangka Belitung	6.81	4.66	7.78	2.66	3.45
10	Kepulauan Riau	7.49	2.46	3.06	3.37	2.36
11	DKI Jakarta	8.95	3.3	2.37	3.72	3.27
12	Jawa Barat	7.76	3.93	2.93	3.46	3.76
13	Jawa Tengah	8.53	2.56	2.32	3.64	2.76
14	D.I Yogyakarta	6.59	3.09	2.29	4.2	2.66
15	Jawa Timur	7.9	3.43	3.22	4.37	3.03
16	Banten	11.27	4.67	3.26	5.17	3.78
17	Bali	8.03	2.7	2.94	3.31	3.4
18	Nusa Tenggara Barat	7.18	3.25	2.47	3.59	3.15
19	Nusa Tenggara Timur	8.32	5.07	2.31	2.05	3.23
20	Kalimantan Utara	8.8	6.69	2.18	2.4	2.6
21	Kalimantan Barat	9.38	6.17	3.88	3.86	3.99
22	Kalimantan Tengah	6.63	4.2	1.91	3.11	3.68
23	Kalimantan Selatan	7.16	5.03	3.68	3.82	2.63
24	Kalimantan Timur	6.74	4.24	2.83	3.69	3.32
25	Sulawesi Utara	9.67	5.56	0.35	2.44	3.83
26	Sulawesi Tengah	8.85	4.17	1.49	4.33	6.46
27	Sulawesi Selatan	8.51	5.18	3.18	4.48	3.48
28	Sulawesi Tenggara	7.4	1.64	3.07	2.96	2.55
29	Gorontalo	6.14	4.3	1.3	4.34	2.15
30	Sulawesi Barat	7.88	5.07	2.23	3.79	1.8
31	Maluku	11.48	8.58	2.97	9.41	1.62
32	Maluku Utara	9.34	4.52	1.91	1.97	4.12
33	Papua	7.98	2.79	4.13	2.41	6.7
34	Papua Barat	5.7	2.77	5.75	1.78	6.02

Sumber: Statistik Indonesia (BPS), Diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat tingkat inflasi di 34 provinsi dalam periode 5 tahun terakhir selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Kondisi inflasi yang tidak disiplin ini (selalu berubah-ubah) juga tidak boleh berfokus pada tingkat inflasi tinggi saja, namun tingkat inflasi rendah juga harus diperhatikan karena jika terus dibiarkan akan menyebabkan deflasi. Rata-rata inflasi pada 34 provinsi di Indonesia tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu 8,33%, sedangkan yang terendah

terjadi di tahun 2018 dengan rata-rata 3,20%. Inflasi provinsi tiap tahun mengalami fluktuasi, namun kondisi ini juga masih dikategorikan rendah dan stabil serta harus dipertahankan. Fenomena naik-turunya laju inflasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang beragam antara lain ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena tingginya permintaan barang dan jasa atau semakin langkanya barang terutama kebutuhan pokok, juga dapat terjadi karena pengeluaran agregat perusahaan yang melebihi kemampuan, tuntutan kenaikan upah pekerja, serta kenaikan BBM dan tarif dasar listrik. Faktor eksternal disebabkan karena dampak dari terjadinya krisis di negara lain terutama negara-negara mitra dagang atau karena terjadinya perubahan nilai tukar mata uang domestik terhadap dolar yang semakin tinggi ini menyebabkan inflasi di Indonesia ikut terkena dampaknya.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi salah satunya dengan cara mengendalikan laju inflasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah atau provinsi agar kondisinya tetap rendah dan stabil. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak hanya menargetkan infasi di tingkat nasional saja, tetapi juga di tingkat provinsi. Dalam penelitian Pratomo dan Kalirajan (2011) bahwa inflasi yang terjadi di provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah memiliki hubungan yang positif signifikan dengan inflasi di provinsi lainnya. Hal ini menunjukan apabila terjadi kenaikan inflasi di provinsi-provinsi besar akan mengarah juga pada kenaikan inflasi di provinsi lainnya, sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap inflasi nasional di Indonesia.

Bank Indonesia “seorang diri” tidaklah mudah dalam mengendalikan inflasi daerah atau provinsi karena setiap daerah memberikan respon yang bermacam-macam terhadap kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kerjasama dalam mengendalikan inflasi daerah salah satunya dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), TPID adalah suatu kelompok atau tim yang dibentuk khusus untuk mengendalikan inflasi dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan beberapa dinas instansi terkait. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) merupakan forum koordinasi yang dibentuk oleh Bank Indonesia untuk membantu pencapaian tingkat inflasi dan menjaga tingkat inflasi agar tetap rendah dan stabil. Melalui TPID, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan seluruh instansi di daerah, yaitu pemerintah kota, BUMN, BUMD dan dinas-dinas terkait untuk bersama-sama membantu pencapaian inflasi di daerah tersebut (Dharma, 2015).

Dalam mencapai keberhasilan dari upaya pengendalian dan penetapan target inflasi perlu adanya identifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inflasi di Indonesia guna merumuskan kebijakan apa yang tepat dalam menjaga stabilitas inflasi. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi inflasi, Salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama periode 1 tahun. Semakin tinggi nilai barang/jasa akhir yang dihasilkan perusahaan-perusahaan di daerah maka akan semakin tinggi pula perolehan PDRB yang nantinya menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mengalami peningkatan. Melalui peningkatan PDRB, peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah akan memacu meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. PDRB dalam perhitungannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu menurut harga berlaku dan menurut harga konstan. Dalam penelitian Ferayanti dkk., (2014) PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Aceh. Namun berbeda dengan yang terjadi di jawa tengah, penelitan Apriliawan dkk., (2013) PDRB tidak berpengaruh terhadap laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Faktor lain yang juga mempengaruhi inflasi yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perkonomian dengan cara menentukan besarnya pengeluaran dan pendapatan pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau provinsi (Sukirno dalam Dewi dkk., 2017).

Dalam penelitian Saraswati dan Kaluge (2017) pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap inflasi di 33 provinsi di Indonesia. Dalam penelitian Dewi dkk., (2017) pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Mendukung penelitian tersebut, penelitian Ferayanti dkk., (2014) juga memberikan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berdampak negatif dan signifikan terhadap inflasi di Provinsi Aceh.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi inflasi selain PDRB dan pengeluaran pemerintah adalah Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah lain dalam perekonomian seperti yang lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang

rendah, tingkat inflasi yang tinggi, dan lainnya. Pengangguran didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam perekonomian yang secara aktif sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno dalam Basuki dan Prawoto, 2015). Penelitian Buchori dan Ambarwati (2011) menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Timur. Mendukung penelitian tersebut, Abu (2019) juga memberikan hasil penelitian yang mengungkapkan adanya hubungan jangka panjang antara pengangguran dan inflasi. Kemudian hasil menunjukkan adanya trade-off antar variabel, yaitu pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan inflasi yang lebih rendah dalam jangka panjang.

Dalam mencapai keberhasilan dari upaya pengendalian dan penetapan target inflasi 34 provinsi di Indonesia, perlu adanya identifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi inflasi di provinsi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam upaya menjaga kestabilan inflasi agar tetap rendah dah stabil. Berdasarkan penyebab inflasi, variabel PDRB dan pengeluaran pemerintah adalah variabel yang mewakili dari sisi permintaan, serta pengangguran adalah variabel yang mewakili dari sisi penawaran. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “analisis pengaruh PDRB, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran terhadap inflasi di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap inflasi di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap inflasi di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap inflasi di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap inflasi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang cukup berarti antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori inflasi dan pengaruhnya dari PDRB, pengeluaran pemerintah, dan pengangguran, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atau bahan referensi untuk perbandingan bagi mahasiswa/i dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang, sedangkan bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan ilmiah.
2. Manfaat bagi pemerintah dan Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa saran serta membantu dalam penentuan

kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas inflasi di Indonesia.

3. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia.